



**PUTUSAN**

Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **MOHAMAD WAHYU, S.Pd.;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/10 Februari 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Ranggamekar RT. 002 RW. 012,  
Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan  
Bogor Selatan, Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN Panaragan  
I) Ketua K3S Kecamatan Bogor  
Tengah);
- II. Nama : **SUBADRI, S.Ag., M.M.;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/8 September 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pajajaran Blok Armin RT. 005/  
RW. 004, Kelurahan Baranangsiang,  
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS Guru (Kepala Sekolah SDN  
Bondongan/Ketua K3S Kecamatan  
Bogor Selatan);
- III. Nama : **DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M.;**

Hal. 1 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/4 Mei 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Palasari RT. 002/RW. 005 Kelurahan  
Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur,  
Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN Bangka III/  
Ketua K3S Kecamatan Bogor Timur);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 2 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor tanggal 19 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II. SUBADRI, S.Ag., M.M., dan Terdakwa III. DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., bersama-sama dengan Sdr. (alm) TAUFAN HERMAWAN), Saksi Drs. J. R. RISNANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), Saksi H. GUNARTO. S.Pd.I, Saksi Drs. H. BASOR, dan Saksi DEDI, S.Pd.I (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II. SUBADRI, S.Ag., M.M., dan Terdakwa III. DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan Rutan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan 3 (tiga) bulan menjalani kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. MOHAMAD WAHYU. S.Pd, Terdakwa II. SUBADRI, S.Ag., M.M., dan Terdakwa III. DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., tetap berada dalam penahanan Rutan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*inkracht van gewijde*);
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar:

*Hal. 3 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I. MOHAMAD WAHYU. S.Pd, sebesar Rp255.498.900,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. Terdakwa II. SUBADRI, S.Ag., M.M., sebesar Rp389.424.600,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah);
  - c. Terdakwa III. DEDE M. ILYAS S.Pd., M.M., sebesar Rp235.587.050,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);
- dengan ketentuan dalam hal para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tahun 2017 s/d 2019 (asli);
    2. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian Kecamatan Tanah Sereal yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Kota Bogor tahun 2017 (asli);
    3. 1 (satu) bundel laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 s/d 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
    4. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan tanah Sereal tahun 2017 yang belum mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;
    5. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus

Hal. 4 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas ribu rupiah) kepada IMAS. W untuk pembayaran TO3, US, dan UKK tanggal 02 Juni 2017 (asli);

6. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada IMAS. W untuk pembayaran UKK, TO3, US tanggal 10 Juni 2017 (asli);
7. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp51.023.800,00 (lima puluh satu juta dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) kepada IMAS. W untuk pembayaran 15007 x Rp3.400,00 = Rp tanggal 03 Januari 2018 (asli);
8. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Tengah sebesar Rp71.885.400,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) kepada IMAS. W untuk pembayaran PTS, TO1, TO2 tanggal 22 Agustus 2018 (asli);
9. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada IMAS. W untuk pembayaran Kontribusi US, TO3, UKK (asli);
10. 7 (tujuh) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli);
11. 6 (enam) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada CV. Mahkota Pratama selama tahun 2018 (asli);
12. 1 (satu) buah buku catatan Kas Umum (asli);
13. 1 (satu) lembar kwitansi CV Mahkota Pratama Nomor 60/MP/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 sebesar Rp175.294.200,00 untuk pembayaran Cetak offset naskah soal TO 1 dan pengolahan data LJK, Cetak offset naskah soal UTS Kelas I s/d VI (asli);

Hal. 5 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Kwitansi CV. Valentine Offset Nomor 27/VO/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp37.047.500,00 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal TO 2 (dua) tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 3096 siswa x Rp11.500,00 Penggantian Bea Materai Rp432.000,00 (asli);
15. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020 tanggal 28 September 2017 (fotokopi);
16. 2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi);
17. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor 821.2 – 38 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Kepala Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotokopi);
18. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik tanggal 25 Januari 2017 (fotokopi);
19. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik tanggal 25 Januari 2017 (fotokopi);
20. 1 (satu) bendel Addendum ke-1 Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/ 2017 tanggal 26 April 2017 Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota

Hal. 6 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Nomor 978.3/2444-set.Disdik dan Nomor 900/157 - Disdik tanggal 25 Januari 2017 (fotokopi);

21. 1 (satu) bendel Addendum ke-2 Nomor: 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik tanggal Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 978./11737-Set.Disdik dan Nomor 900/1510-Disdik/2017 tanggal 3 April 2017 (fotokopi);
22. 1 (satu) bendel Addendum ke-3 Nomor: 978.3/31352/Set.Disdik/2017 dan Nomor 900/6218-Disdik tanggal 21 November 2017 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2017 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 978.3/23381/Set.Disdik/2017 dan Nomor 421./3336-Disdik (fotokopi);
23. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 978/3965-Set.Disdik/2018 dan Nomor 900/393-Bid SMP/2018 tanggal 05 Februari 2018 (fotokopi);
24. 1 (satu) bendel Addendum ke-1 Nomor: 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor: 900/2862-Bid SMP/2018 tanggal 10 April 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 978/3965-Set.Disdik dan Nomor 900/393-Bid SMP/2018 tanggal 5 Februari 2018;
25. 1 (satu) bendel Addendum ke-2 Nomor: 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor:900/4860-Disdik tanggal 16 Juli 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 978.3/7710/Set.Disdik dan Nomor 900/2862-Bid SMP/2018 tanggal 10 April 2018;
26. 1 (satu) bendel Addendum ke-3 Nomor: 978.3/19029-Set.Disdik dan Nomor 900/7487-Disdik tanggal 19 November 2018 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara

Hal. 7 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor: 978.3/73309-Set.Disdik dan Nomor: 900/4860-Disdik tanggal 16 Juli 2018;

27. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Hibah BOS Reguler Tahun 2019 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik tanggal 27 Februari 2019 (fotokopi);
28. 1 (satu) bendel Addendum ke-1 Nomor: 978.3/19394-Set.Disdik dan Nomor 421.3/6330-Bid SMP tanggal 20 November 2019 Atas Atas Naskah Perjanjian Hibah BOS Pusat Tahun 2018 Antara Gubernur Jawa Barat Dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Nomor: 978.3/2841-Set.Disdik dan Nomor 900/786-Disdik tanggal 27 Februari 2019 (fotokopi);
29. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-111 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (fotokopi legalisir);
30. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-85 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (fotokopi legalisir);
31. 1 (satu) bendel Keputusan Walikota Bogor Nomor 420.45-89 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (fotokopi legalisir);
32. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385 - Disdik tanggal 20 September 2016 Tentang Pembentukan Serta Kepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (asli);
33. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

Hal. 8 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Timur Periode 2017-2020 (fotokopi legalisir);
34. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode 2017-2020 (fotokopi legalisir);
35. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tanah Sareal Periode 2017-2020 (fotokopi legalisir);
36. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Barat Periode 2017-2020 (fotokopi legalisir);
37. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode 2017-2020 (fotokopi legalisir);
38. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara Periode 2017-2020 (fotokopi legalisir);
39. 1 (satu) bendel Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Dan Fungsional Di Lingkungan Dinas Pendidikan (fotokopi);

Hal. 9 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 005/958-Bid.SMP tanggal 06 Maret 2019 Perihal Undangan Rapat (fotokopi);
41. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/1023-Bid.SMP tanggal 13 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019;
42. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/1064-Bid.SMP tanggal 15 Maret 2019 Perihal Permohonan Tim Asistensi RKAS SD dan SMP TA. 2019;
43. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 005/4314 - Bid. SD tanggal 13 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan (asli);
44. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/385-Disdik tanggal 20 September 2016 tentang pembentukan serta kepengurusan kelompok kerja kepala sekolah jenjang sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Kepengurusan 2016-2019 (fotokopi);
45. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017 (asli);
46. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2018 (asli);
47. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli);
48. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 800/347.GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah Sereal;
49. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah);
50. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun pelajaran 2017/2018;

Hal. 10 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S Kecamatan Tanah Sereal;
52. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sereal;
53. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentine Offset tanggal 10 Oktober 2011 Nomor 04 dari Notaris NUR NADIA TADJOEDIN, SH (fotokopi);
54. 1 (satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
55. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Utara dengan CV. Valentine Offset;
56. 1 (satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Selatan dengan CV. Valentine Offset;
58. 1 (satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
59. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Barat dengan CV. Valentine Offset;
60. 1 (satu) bundel Surat Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur Perihal Pesanan Naskah Soal kepada CV. Valentine Offset;
61. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Bogor Timur dengan CV. Valentine Offset;
62. 1 (satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV. Valentine Offset;

Hal. 11 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Tanah Sareal CV. Valentine Offset;
64. 1 (satu) berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;
65. 1 (satu) berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Barat CV. Valentine Offset;
66. 1 (satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Valentine Offset dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2017 s.d 2019;
67. 1 (satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Valentine Offset;
68. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Barat;
69. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Utara;
70. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Selatan;
71. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN UTS/PTS 2018/2019 Bogor Timur;
72. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Timur;
73. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Selatan;
74. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Utara;
75. 1 (satu) bundel Pembayaran PPN TUC 1 2018/2019 Bogor Barat;
76. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk

Hal. 12 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



pembayaran perjalanan dinas tanggal 06 Februari 2018 (asli);

77. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembinaan dan penulisan naskah PAS semester 2 2017-2018 tanggal 25 Februari 2018 (asli);
78. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Kepala Dinas bulan Maret 2019 (asli);
79. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk pembuatan soal UKK / PAT kelas 1 s/d 5 bulan Maret 2019 (asli);
80. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dari percetakan untuk PAI Sumedang bulan Maret 2019 (asli);
81. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari CV. Valentine Offset sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi percetakan untuk Dinas bulan Mei 2019 (asli);
82. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp24.312.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah TO 1 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
83. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp24.312.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah TO 2 U/2388 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);

*Hal. 13 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp27.713.500,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp11.500,00 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
85. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp39.589.500,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian untuk 2.371 siswa @ Rp16.500 tanggal 02 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
86. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp139.586,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah UTS 2016/2017 tanggal 16 Maret 2017 (copian CV. Valentine Offset);
87. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp96.988.000,00 (sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s/d 5 tanggal 2 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
88. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp156.448.000,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 04 Oktober 2017 (copian CV. Valentine Offset);
89. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 28 November 2017 (copian CV. Valentine Offset);

Hal. 14 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp36.355.500,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp11.500,00 dan penggantian materai Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
91. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp52.006.500,00 (lima puluh dua juta enam ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan Pemindaian sebanyak 3.123 siswa @ Rp16.500 dan penggantian materai Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
92. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp100.144.000,00 (seratus juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK Kelas I s/d V sebanyak 12.461 siswa @ Rp8.000,00 dan Penggantian materai Rp456.000,00 tanggal 03 Juni 2017 (copian CV. Valentine Offset);
93. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp76.425.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 sebanyak 9.513 set x Rp8.000,00 dan penggantian materai tanggal 22 Desember 2017 (copian CV. Valentine Offset);
94. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sereal sebesar Rp28.214.200,00 (dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp9.800,00 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);

Hal. 15 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



95. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp33.108.500,00 (tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.879 siswa x Rp11.500,00 tanggal 23 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
96. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp159.638.400,00 (seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS semester genap sebanyak 16.629 siswa x Rp9.600,00 tanggal 08 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
97. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp140.848.200,00 (seratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak 14.622 siswa x Rp9.600,00 dan penggantian Bea Materai Rp477.000,00 tanggal 19 Mei 2018 (copian CV. Valentine Offset);
98. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp168.067.200,00 (seratus enam puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran biaya penggandaan naskah UTS/ PTS ganjil Tahun 2018/ 2019 sejumlah 17.507 siswa x Rp9.600,00 tanggal 29 Agustus 2018 (copian CV. Valentine Offset);
99. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp211.284.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PASTahun 2018/2019 sebanyak 17.607 siswa x Rp12.000,00 tanggal 10 Desember 2018 (copian CV. Valentine Offset);
100. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp40.111.200,00 (empat puluh

*Hal. 16 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa x Rp9.800,00 = Rp39.484.000,00 dan penggantian Bea Materai Rp627.000,00 tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);

101. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp46.891.500,00 (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 4.023 siswa x Rp11.500,00 = Rp46.264.500,00 dan penggantian Bea Materai Rp627.000,00 tanggal 27 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
102. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp225.549.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester genap sebanyak 23.425 siswa x Rp9.600,00 = Rp224.784.000,00 dan penggantian Bea Materai Rp765.000,00 tanggal 20 Maret 2018 (copian CV. Valentine Offset);
103. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp216.364.800,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 22.538 siswa x Rp9.600,00 tanggal 30 September 2018 (copian CV. Valentine Offset);
104. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp167.880.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UAS Tahun pelajaran 2018/2019 sebanyak 13.990 siswa x Rp12.000,00 tanggal 6 Desember 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);

Hal. 17 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS semester ganjil Tahun pelajaran 2018/ 2019 sebanyak 13.750 siswa x Rp9.600,00 tanggal 28 September 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
106. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp118.888.800,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1 s/d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp9.600,00 dan penggantian Bea Materai Rp444.000,00 tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
107. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp61.747.800,00 (enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp19.800,00 dan penggantian Bea Materai Rp447.000,00 tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
108. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah sebesar Rp42.243.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.096 siswa x Rp13.500,00 dan penggantian Bea Materai Rp447.000,00 tanggal 21 Mei 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);
109. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp28.167.000,00 (dua puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 dan Pemindaian LJK sebanyak 2.412 siswa x Rp11.500,00,00 = Rp27.738.000,00 dan

Hal. 18 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Bea Materai Rp429.000,00 tanggal 24 Maret 2018 (copian CV. Mahkota Pratama);

110. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp201.581.000,00 (dua ratus satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran cetak soal UAS/PAS SD Tahun 2017/2018 u/ 25.102 x Rp8.000,00 tanggal 28 Desember 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
111. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Utara sebesar Rp111.224.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal PTS ganjil tahun 2017/2018 sebanyak 13.903 siswa x Rp8.000,00 tanggal 23 September 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
112. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp30.483.400,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun 2016/2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp10.000,00 tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
113. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan sebesar Rp30.483.400,00 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 siswa x Rp10.000,00 tanggal 14 Maret 2017 (copian CV. Mahkota Pratama);
114. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp19.249.400,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 semester genap tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 1.933 siswa x Rp9.800,00 dan Pengolahan data LJK dan penggantian bea matrai tanggal 15 Februari 2018 (copian CV. Mulia Agung);

Hal. 19 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





115. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor barat sebesar Rp37.599.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 1 tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.689 siswa x Rp10.000,00 dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
116. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp177.730.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UTS tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 22.099 siswa x Rp8.000,00 dan bea matrai tanggal 15 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
117. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp28.564.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 2 tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 2.810 siswa x Rp10.000,00 dan bea matrai Rp464.000,00 tanggal 22 Maret 2017 (copian CV. Mulia Agung);
118. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp44.666.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp11.500,00 dan Pengolahan data LJK tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
119. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Barat sebesar Rp64.086.000,00 (enam puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.884 siswa x Rp16.500,00 tanggal 18 Mei 2017 (copian CV. Mulia Agung);
120. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp26.419.500,00 (dua puluh

*Hal. 20 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*





enam juta empat ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal TO 3 dan pemindaian LJK sebanyak 1.933 siswa x Rp13.500,00 dan penggantian bea matrai Rp324.000,00 tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);

121. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp38.597.400,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal US dan pemindaian LJK sebanyak 1.933 siswa x Rp19.800,00 dan penggantian bea matrai Rp324.000,00 tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
122. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur sebesar Rp76.449.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk pembayaran cetak Offset naskah soal UKK kelas 1-5 tahun pelajaran 2017/2018 sebanyak 7.930 siswa x Rp9.600,00 dan penggantian bea matrai Rp321.000,00 tanggal 14 Mei 2018 (copian CV. Mulia Agung);
123. 1 (satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mulia Agung dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2017 s.d 2018 (CV. Mulia Agung);
124. 1 (satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mulia Agung;
125. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Mulia Agung tanggal 04-12-2013 Nomor 01 dari Notaris Diah Kusumawhardani, SH. M.Kn (fotokopi);
126. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
127. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi CV. Mahkota Pratama);

Hal. 21 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
129. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
130. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
131. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
132. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Utara (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
133. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Utara (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
134. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Utara (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
135. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Utara (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
136. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Utara (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
137. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Utara (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
138. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
139. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS Genap I – VI tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
140. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
141. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
142. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi CV. Mahkota Pratama);

Hal. 22 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2016 s/d 2017 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
144. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UKK/PAT I – V tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
145. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Genap tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
146. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU US tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
147. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 3 tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
148. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 2 tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
149. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU TUC 1 tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
150. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Barat (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
151. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Bogor Barat (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
152. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UTS/PTS Ganjil tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Tanah Sereal (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
153. 1 (satu) bundel Kwitansi dan MOU UAS/PAS tahun 2017 s/d 2018 Kecamatan Tanah Sereal (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
154. 1 (satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
155. 1 (satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Tengah CV. Mahkota Pratama; (fotokopi CV. Mahkota Pratama);

Hal. 23 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
157. 1 (satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Utara CV. Mahkota Pratama; (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
158. 1 (satu) bundel Jumlah Kegiatan CV. Mahkota Pratama Tahun Anggaran 2017-2018 (fotokopi);
159. 2 (dua) lembar Form Jumlah lembar pencetakan soal oleh perusahaan percetakan Tahun 2017 (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
160. 1 (satu) eksemplar akta pendirian perseroan komanditer CV. MAHKOTA PRATAMA tanggal 4 Desember 2013 Nomor: 02,00 Notaris Diah Kusumawhardani, SH.MKn, (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
161. 1 (satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Mahkota Pratama dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2017 s.d 2018 (fotokopi CV. Mahkota Pratama);
162. 1 (satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Mahkota Pratama;
163. 2 (dua) bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Kebon pedes 1 Kecamatan Tanah Sareal Perihal Pesanan Naskah Soal dan MoU Payung antara SDN Kebon Pedes 1 dan CV. Puspita (fotokopi CV. Puspita);
164. 2 (dua) bundel Surat Sekolah Dasar Negeri Pengadilan 1 Kecamatan Bogor Tengah Perihal Pesanan Naskah Soal dan Mou Payung antara SDN Pengadilan 1 dan CV. Puspita (fotokopi CV. Puspita);
165. 1 (satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (fotokopi CV. Puspita);

Hal. 24 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Timur CV. Puspita (fotokopi CV. Puspita);
167. 1 (satu) Berkas File MoU, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak UAS/PAS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (fotokopi CV. Puspita);
168. 1 (satu) Berkas File MoU Payung, Mou Turunan, Kwitansi, Faktur, E Billing Bukti Setoran Pajak PTS/UTS Ganjil SD TP. 2018-2019 Bogor Selatan CV. Puspita (fotokopi CV. Puspita);
169. 1 (satu) bundel penghitungan dana yang diterima CV. Puspita dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2018 s.d 2019 (fotokopi CV. Puspita);
170. 1 (satu) bundel penghitungan jumlah halaman naskah soal dalam kegiatan UTS, UAS, UKK, TO-1, TO-2, TO-3, DAN US TA. 2017 s.d 2019 yang dikelola CV. Puspita;
171. 1 (satu) bundel Laporan BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
172. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Polisi 1 Bogor Tengah (asli);
173. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Periode April-Juni 2017 SDN Papandayan (asli);
174. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 dan 2 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
175. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
176. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Cibuluh 1 Bogor Utara (asli);
177. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode Januari 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
178. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April 2017 SDN Gunung Batu 1 Bogor Barat (asli);
179. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);

Hal. 25 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
181. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
182. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Semplak 1 Bogor Barat (asli);
183. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Periode Januari s.d Maret Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
184. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Kertamaya Bogor Selatan (asli);
185. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Harjasari 1 Bogor Selatan (asli);
186. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
187. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBD Triwulan 4 Tahun 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
188. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan 2 Tahun 2017 SDN Bangka 3 Bogor Timur (asli);
189. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Januari s.d Maret 2017 SDN Tajur 2 Bogor Timur (asli);
190. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Juli s.d September 2017 SDN Kencana 1 Tanah Sareal (asli);
191. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Periode April s.d Juni 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
192. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 Tahun 2017 SDN Kebon Pedes Tanah Sareal (asli);
193. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 Tahun 2017 SDN Kukupu 3 Tanah Sareal (asli);
194. 1 (satu) bundel SK Walikota Pengangkatan dan alih tugas dari dan dalam jabatan Administrator setara Kepala Bidang, Sekretaris, Camat dan Kepala Bidang RSUD di Lingkungan

Hal. 26 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bogor Nomor: 821-155 Tahun 2016 Asli dan fotokopi;

195. 1 (satu) Buku Panduan Diklat Kegiatan BIMTEK Perencanaan Program Pembinaan Sekolah Dasar;
196. 1 (satu) Buku Pedoman NGABASO (Ngabring Ka Sakola);
197. 1 (satu) Daftar Hadir Rapat Dinas Sosialisasi Pendirian SMP Bakti Prasetya;
198. 1 (satu) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Kota Bogor (fotokopi);
199. 1 (satu) Seprint Panitia Bimtek Pengelolaan BOS APBN 2020 (fotokopi);
200. 1 (satu) Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (fotokopi);
201. 1 (satu) Buku Block Note;
202. 1 (satu) SK Pembagian Tugas kepengawasan sekolah Binaan jenjang SD di Lingkungan Disdik Kota Bogor (fotokopi);
203. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Honor TAS, Penjaga Sekolah SDN Kedung Halang 5 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotokopi);
204. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 1 bulan April 2020 (fotokopi);
205. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 6 bulan Juni 2020 (fotokopi);
206. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 7 bulan Maret 2020 (fotokopi);
207. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 8 bulan Juni 2020 (fotokopi);
208. 1 (satu) SI Honor SDN Bantarjati 9 bulan Maret 2020 (fotokopi);
209. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 1 bulan April 2020 (fotokopi);
210. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 2 bulan Juni 2020 (fotokopi);
211. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 3 bulan Juni 2020 (fotokopi);
212. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 4 bulan April 2020 (fotokopi);
213. 1 (satu) SI Honor SDN Cimahpar 5 bulan April 2020 (fotokopi);
214. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 2 bulan April 2020 (fotokopi);
215. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 3 bulan April 2020 (fotokopi);
216. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 4 bulan Juni 2020 (fotokopi);
217. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 5 bulan April 2020 (fotokopi);
218. 1 (satu) SI Honor SDN Cibuluh 6 bulan April 2020 (fotokopi);

Hal. 27 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 1 bulan Juni 2020 (fotokopi);
220. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 2 bulan Juni 2020 (fotokopi);
221. 1 (satu) SI Honor SDN Kedung Halang 3 bulan April 2020 (fotokopi);
222. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 1 bulan Maret 2020 (fotokopi);
223. 1 (satu) SI Honor SDN Ceger 2 bulan April 2020 (fotokopi);
224. 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Honor TAS, Penjaga Sekolah SDN Ciluar 1 Triwulan Ke-1 Tahun 2020 (fotokopi);
225. 1 (satu) SI Honor SDN Ciluar 3 bulan April 2020 (fotokopi);
226. 1 (satu) SI Honor SDN Selaawi bulan April 2020 (fotokopi);
227. 1 (satu) SI Honor SDN Kampung Sawah bulan April 2020 (fotokopi);
228. 1 (satu) SI Honor SDN Sindangsari Utara bulan April 2020 (fotokopi);
229. 1 (satu) SI Honor SDN Neglasari bulan Juni 2020 (fotokopi);
230. 1 (satu) SI Honor SDN Kawung Luwuk bulan Juni 2020 (fotokopi);
231. 1 (satu) SI Honor SDN kaum bulan Juni 2020 (fotokopi);
232. 1 (satu) SK Pembagian Tugas SDN Bhayangkari (fotokopi);
233. 1 (satu) SI Honor SDN Bogor Baru bulan Maret 2020 (fotokopi);
234. 1 (satu) bundel Surat Undangan Raker Pembahasan Kerangka Acuan kerja (KAK) untuk Kajian Perencanaan Pembangunan Urusan Pembangunan (fotokopi);
235. 1 (satu) bundel Surat Permohonan keringanan biayake SMP PGRI 3 atas nama Alfiah Kurniasih (asli);
236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd bulan Juni 2020 (asli);
237. 1 (satu) bundel Slip Penarikan tabungan atas nama Drs Maman Suherman, M.Pd bulan Juli 2020 (asli);
238. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 1 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;

Hal. 28 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD Triwulan 2 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
240. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan ke-3 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
241. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS KOTA Bogor Triwulan ke-4 SDN Harjasari 1 Tahun 2018;
242. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 1 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
243. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 2 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
244. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 3 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
245. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan 4 SDN Polisi 1 Tahun 2018;
246. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
247. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 3 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
248. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota Bogor Triwulan 4 SDN Cibuluh 1 Tahun 2018;
249. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 1 SDN Kertamaya Tahun 2018;
250. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 2 SDN Kertamaya Tahun 2018;
251. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 3 SDN Kertamaya Tahun 2018;
252. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD/Sirkas Triwulan 4 SDN Kertamaya Tahun 2018;
253. 1 (satu) bundel Laporan Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 1 SDN Semplak 1 Tahun 2018;

Hal. 29 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD Kota Bogor Triwulan 21 SDN Semplak 2 Tahun 2018;
255. 1 (satu) bundel Laporan pertanggung jawaban penggunaan Bos APBD SDN Semplak 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Barat;
256. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Selatan;
257. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
258. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
259. 1 (satu) bundel Laporan Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
260. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 2 Kecamatan Bogor Selatan;
261. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 3 Kecamatan Bogor Selatan;
262. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD atau Sirkas SDN Kertamaya Triwulan 4 Kecamatan Bogor Selatan;
263. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
264. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
265. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;
266. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota SDN Bangka 3 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;
267. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur;
268. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 2 Kecamatan Bogor Timur;
269. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Timur;

Hal. 30 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBD SDN Tajur 2 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Timur;
271. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Utara;
272. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 3 Kecamatan Bogor Utara;
273. 1 (satu) bundel Laporan Pengelolaan Keuangan BOS APBD SDN Cibuluh 1 Triwulan 4 Kecamatan Bogor Utara;
274. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sareal;
275. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sareal;
276. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sareal;
277. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBD SDN Kencana 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sareal;
278. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 1 Kecamatan Tanah Sareal;
279. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 2 Kecamatan Tanah Sareal;
280. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 3 Kecamatan Tanah Sareal;
281. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan BOS Kota SDN Kebon Pedes 1 Triwulan 4 Kecamatan Tanah Sareal;
282. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz AT Warna Hitam Plat Nomor F 1408 DO;
283. 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (asli);
284. 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (asli);
285. 1 (satu) buah buku agenda catatan warna biru (asli);
286. 1 (satu) bundel odher MOU Payung Kecamatan Bogor Barat (asli);

Hal. 31 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Timur (asli);
288. 1 (satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Tanah Sareal (asli);
289. 1 (satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Selatan (asli);
290. 1 (satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Utara (asli);
291. 1 (satu) bundel odner MOU Payung Kecamatan Bogor Tengah (asli);
292. 1 (satu) buah laptop merk Sony VAIO model SVE14113EGW warna putih beserta charger;
293. 1 (satu) buah laptop merk ASUS Windows 10 product ID: 00327-35000-00000-AAOEM warna rose gold beserta charger;
294. 3 (tiga) buah stempel CV. Mahkota Pratama;
295. 4 (empat) buah stempel CV. Valentin Offset;
296. 1 (satu) buah stempel CV. Puspita;
297. 1 (satu) bundel invoice tahun 2018 (asli);
298. 1 (satu) bundel nota atas nama Bapak Risnanto tahun 2018 (asli);
299. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2018-2019 (asli);
300. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2018 (asli);
301. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2018 (asli);
302. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Barat tahun 2019 (asli);
303. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Timur tahun 2019 (asli);
304. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Selatan tahun 2019 (asli);

Hal. 32 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Tanah Sareal tahun 2019 (asli);
306. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Utara tahun 2019 (asli);
307. 1 (satu) map pesanan naskah soal Kecamatan Bogor Tengah tahun 2019 (asli);
308. 5 (Lima) lembar sample kertas ukuran A3;
309. 1 (satu) buah HP Warna Putih Merk Samsung Galaxy J7 Prime Nomor Model SM-G601F/DS;
310. 1 (satu) buah HP Warna Hitam Merk Oppo F11 Model CPH 1911 dan Sim card dengan nomor 0811113839;
311. 1 (satu) buah Pasport dengan sampul warna cream atas nama Drs. J.R Risnanto (asli);
312. 1 (satu) buah Pasport dengan cover warna hijau atas nama J.R Risnanto (asli);
313. 5 (lima) lembar mutase rekening OCBC NISP atas nama Drs. J.R Risnanto periode 1 Juni 2018 s/d 6 September 2018 (copy);
314. 1 (satu) bundel mutasi rekening Drs. J.R Risnanto nomor 134/REF/KU.03/MS/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 (copy);
315. 2 (dua) lembar rekapan nama-nama Kepala Sekolah SMPN Se Kota Bogor (copy);
316. 2 (dua) bundel AJB Perjanjian Pengikatan Jual Beli Gardenia @ Bogor Apartemen dan Hotel atas nama Neni Puspitowati, BA (asli);
317. 2 (dua) lembar surat petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-129 tahun 2016 tanggal 30 September 2016 tentang alih tugas guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri di lingkungan pemerintah Kota Bogor dan pengangkatan guru sekolah dasar (SD) Negeri yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotokopi);
318. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2017 (asli);

Hal. 33 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2018 (asli);
320. 1 (satu) bundel faktur, kwitansi dan surat pernyataan Kerjasama SDN Harjasari 1 Tahun 2019 (asli);
321. 1 (satu) bundel data banyaknya siswa SDN Harjasari 1 tahun 2017 s.d 2019 (fotokopi);
322. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan September 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur pembayaran dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino (CV. Mahkota Pratama) (fotokopi);
323. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan nopember 2016, 1 (satu) lembar kwitansi berikut faktur dari SDN Harjasari 1 kepada Y. Briantino (CV. Mahkota Pratama) 2 (dua) lembar surat pernyataan Kerjasama antara SDN Harjasari 1 dan CV. Mahkota Pratama (fotokopi);
324. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum periode oktober-desember 2019 berikut lampiran sebanyak 3 (tiga) lembar (fotokopi);
325. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2017 (fotokopi);
326. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2018 (fotokopi);
327. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana APBD BOS Kota Bogor SDN Harjasari 1 T.A 2019 (fotokopi);
328. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2017 (asli);
329. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN SDN Harjasari 1 T.A 2018 (asli);
330. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN Harjasari 1 T.A 2019 (asli);
331. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia) (asli);

Hal. 34 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Ilmu Pengetahuan Alam, B Indonesia) (asli);
333. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (B. Indonesia, Pend. Agama Islma, Ilmu P. Alam, Matematika) (asli);
334. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2016/2017 (Pend. Lingkungan hidup, B. Sunda, Pend.Kewarganegaran, Ilmu Pengetahuan Sosial) (asli);
335. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester Genap (UTS/PTS) TA. 2016/2017 kelas. 3 (Pen. Agama Islam, Pkn, Ips, Pend. Lingkungan Hidup, Matematika, Ipa), kelas. 4 (Tema 7), kelas 6 (Pkn, Ipa, Matematika, B. Sunda) (asli);
336. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Kenaikan Kelas (UUK) TA. 2016/2017 Kelas. 1 (Pkn, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng.Sosial, Agama Islam) kelas. 2 (Agama Islam, B. Sunda, Ilmu Peng Sosial, Ilmu Peng Alam, Matematika, Pkn) kelas. 3 (Pend. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Matematika, Ilmu Peng. Sosial, B. Inndonesia, Pend. Lingk Hidup, B. Sunda) Kelas. 4 (B. Sunda, Pend. Agama Islam, Pkn) Kelas. 5 (Pkn, Pend. Agama Islam, B. Sunda) Kelas. 6 (Pend. Agama Islam, B. Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Matematika, Pkn) (asli);
337. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (UTS/PTS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas. 1 (Pen. Agama Islam, B. Indonesia, Pkn, Matematika, B. Sunda) Kelas. 4 (Pend. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng.Sosial) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Alam, B. Indonesia, B. Sunda, Matematika, B. Sunda) (asli);
338. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) Ganjil TA.2017/2018 Kelas. 1 (Pen. Agama Islam, B. Indonesia, Pkn, Matematika, B. Sunda) Kelas. 4 (Pend. Agama. Islam, Pkn, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B. Sunda) Kelas. 5 (Matematika, Pkn, Ilmu Peng. Sosial, B. Sunda) Kelas. 6 (B. Sunda) (asli);

Hal. 35 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

339. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B. Indonesia) (asli);
340. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (Ilmu Peng. Alam, B. Indonesia, Matematika) (asli);
341. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2017/2018 (B. Indonesia, Matematika, Pend. Agama Islam) (asli);
342. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA. 2017/2018 (Pend. Kewarganegaraan, Pend. Lingkungan Hidup, B. Inggris, B. Sunda, Ilmu Peng. Sosial) (asli);
343. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Tengah Semester (PTS/UTS) Genap TA. 2017/2018 Kelas. 2 (Pen. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, Matematika, Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 (Pkn, Matematika, B. Indonesia, Ilmu Pend. Sosial, B. Sunda) Kelas. 6 (Pend. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, Ilmu Peng. Sosial, Matematika, Ilmu Peng. Alam, B. Sunda, Pend. Lingk. Hidup, B. Inggris) (asli);
344. 1 (satu) bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) TA. 2017/2018 Kelas. 1 (Matematika, B. Sunda, Pend. Agama Islam, B. Indonesia, Pkn) Kelas. 2 (Pend. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, B. Sunda) Kelas. 4 (Pkn, Ilmu Peng. Alam, B. Sunda, Matematika, B. Indonesia, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, B. Sunda) Kelas. 6 (Peng. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, Matematika, B. Sunda, Peng. Lingk. Hidup, B. Inggris) (asli);
345. 1 (satu) bundel Naskah Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Ganjil TA. 2018/2019 Kelas. 1 (Matematika, B. Sunda) Kelas. 2 (Pkn, B. Indonesia, Matematika, B. Sunda) Kelas. 3 (B. Indonesia, B. Sunda, Pkn) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, Pkn, B. Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial) Kelas. 6 (B. Sunda) Kelas. 4 (Ilmu Peng. Sosial, Pkn, Ilmu

Hal. 36 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peng. Alam, Matematika, B. Sunda, B. Indonesia) Kelas. 6 (Pend. Agama Islam, B. Sunda, Ppkn, B. Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial) (asli);
346. 1 (satu) bundel Naskah Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) Ganjil TA.2018/2019 Kelas. 1 (Ppkn, B. Sunda, B. Indonesia) Kelas. 2 (Ppkn, B. Indonesia, Matematika, B. Sunda) Kelas. 4 (Matematika, B. Sunda, Ilmu Peng. Alam, Ppkn, Ilmu Peng. Sosial, B. Indonesia) Kelas. 3 (B. Sunda) Kelas. 5 (Ppkn, Matematika, Ilmu Peng. Sosial, B. Sunda) Kelas. 6 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B. Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, B. Sunda) (asli);
347. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 1 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 (Ilmu Peng. Alam, Matematika, Bahasa Indonesia) (asli);
348. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 2 Ujian Sekolah TA. 2018/2019 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (asli);
349. 1 (satu) bundel Naskah Soal Tes Uji Coba (TUC) 3 Ujian Sekolah TA. 2016/2017 (Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Peng. Alam) (asli);
350. 1 (satu) bundel Naskah Soal Ujian Sekolah (US) TA.2018/2019 (B. Sunda, Pend. Kewarganegaraan, Ilmu Peng. Sosial) (asli);
351. 1 (satu) bundel Naskah Soal Penilaian Akhir (PAT) TA. 2018/2019 Kelas. 6 (Ppk, B. Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng.Sosial, B. Sunda) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, B. Indonesia, Ppkn) Kelas. 4 (Matematika) Kelas. 5 (Ilmu Peng. Sosial, B. Sunda) Kelas. 4 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B. Indonesia, Ilmu Peng.Sosial, Matematika, B. Sunda, Ilmu Poeng. Alam) Kelas. 2 (Peng. Agama Islam, Ppkn, B. Indonesia, Matematika, B. Sunda) Kelas.1 (Ppkn, Matematika, B. Indonesia, B. Sunda) (asli);
352. 1 (satu) bundel NaskaH Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap TA. 2018/2019 Kelas. 1 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B.

Hal. 37 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indonesia, Matematika, B. Sunda) Kelas. 3 (Pend. Agama Islam, Matematika) Kelas. 4 (Ppk, B. Indonesia, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, Matematika, B. Sunda) Kelas. 5 (Pend. Agama Islam, Ppkn, B. Indonesia, Matematika, Ilmu Peng. Sosial, Ilmu Peng. Alam, B. Sunda) Kelas. 6 (Peng. Agama Islam, Ppkn, B. Indonesia, Ilmu Peng. Alam, Ilmu Peng. Sosial, Matematika B. Sunda) (asli);

353. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017 (asli);
354. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018 (asli);
355. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Kegiatan Evaluasi Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 dan Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019 (asli);
356. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS APBN TA. 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
357. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2018 SD Negeri Polisi 1 (asli);
358. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (asli);
359. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN TA. 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
360. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD TA. 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
361. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD TA. 2018 SD Negeri Polisi 1 (asli);

Hal. 38 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD TA. 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
363. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
364. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
365. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
366. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
367. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (asli);
368. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (asli);
369. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (asli);
370. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2018 SD Negeri Polisi 1 (asli);
371. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Januari s.d Maret Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
372. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan II April s.d Juni Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
373. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan III Juli s.d September Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
374. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan IV Oktober s.d Desember Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
375. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
376. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
377. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);

Hal. 39 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2017 SD Negeri Polisi 1 (asli);
379. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS APBD Triwulan I Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (asli);
380. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan II Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (asli);
381. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan III Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (asli);
382. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban BOS Kota Triwulan IV Tahun 2018 SD Negeri Polisi I (asli);
383. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan I Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
384. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan II Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
385. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan III Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
386. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS Kota Triwulan IV Tahun 2019 SD Negeri Polisi 1 (asli);
387. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN (BOS Pusat) TA. 2017 SDN Tajur 1 (asli);
388. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan TA. 2017 SDN Tajur 1 (fotokopi);
389. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA. 2018 SDN Tajur 1 (asli);
390. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS Pusat (APBN) TA. 2018 SDN Tajur 1 (asli);
391. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Pusat TA. 2019 SDN Tajur 1 (asli);
392. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan (BOS Pusat) TA. 2019 SDN Tajur 1 (asli);

Hal. 40 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur1 tanggal 15 Maret 2018 CV. Mulia Agung (fotokopi);
394. 4 (empat) lembar Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 tanggal 02 Mei 2019 CV. Valentine Offset (fotokopi);
395. 1 (satu) eksemplar SK Walikota Bogor Nomor 820.45-447 Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotokopi);
396. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A. 2017 (asli);
397. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A. 2018 (asli);
398. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 1 T.A. 2019 (asli);
399. 1 (satu) lembar kwitansi Penggandaan soal-soal PTS Ganjil tanggal 24 September 2019 (asli);
400. 4 (empat) lembar Nomor rekening sekolah BOS APBN dan APBD (Buku Diserahkan Ke BJB) (fotokopi);
401. 1 (satu) bundel Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (fotokopi);
402. 1 (satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan (fotokopi);
403. 1 (satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 8 Tahun 2017 JUKNIS BOS Tahun 2017 (fotokopi);
404. 1 (satu) bundel PERWALI Kota Bogor Nomor 86 Tahun 2018 (fotokopi);
405. 1 (satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 1 Tahun 2018 JUKNIS BOS Tahun 2018 (fotokopi);
406. 1 (satu) bundel PERMENDIKBUD RI Nomor 3 Tahun 2019 JUKNIS BOS Tahun 2019 (fotokopi);

Hal. 41 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Papandayan (fotokopi);
408. 1 (satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2017 (asli);
409. 1 (satu) bundel Kuitansi Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2018 (asli);
410. 1 (satu) bundel Kuitansi Dan Standing Instruction (SI) Kegiatan Penilaian Tahun Anggaran 2019 (asli);
411. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2017 (asli);
412. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2018 (asli);
413. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2019 asli);
414. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2017 (asli);
415. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2018 (asli);
416. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun 2019 (asli);
417. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017 (asli);
418. 1 (satu) bundel Berkas Soal Tes Uji Coba/TO Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017 (asli);
419. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017 (asli);
420. 1 (satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017 Tahun Anggaran 2017 (asli);
421. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017 (asli);

Hal. 42 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (satu) bundel berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2017 (asli);
423. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun 2018 (asli);
424. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018 (asli);
425. 1 (satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2017/2018 Tahun Anggaran 2018 (asli);
426. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018 (asli);
427. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2018 (asli);
428. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019 (asli);
429. 1 (satu) bundel Berkas Soal Try Out/Uji Coba Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019 (asli);
430. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Genap PAT Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019 (asli);
431. 1 (satu) bundel Berkas Soal Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2018/2019 Tahun Anggaran 2019 (asli);
432. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019 (asli);
433. 1 (satu) bundel Berkas Soal Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 Tahun Anggaran 2019 (asli);
434. Uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;
435. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 02 Juni 2017 untuk pembayaran TO 3, US, dan UKK (Rp68.611.000,00 - Rp40.611.000,00 sisa yang belum dibayar Rp28.000.000,00) banyak uang sejumlah Rp40.611.000,00 (empat puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada IMAS W (asli);

Hal. 43 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. (satu) lembar kwitansi Nomor: 54/MP/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 untuk pembayaran Cetak Offset naskah soal UKK Kelas 1 s.d 5 sebanyak 12.338 siswa x Rp9.600,00 dan penggantian bea materai Rp444.000,00 banyak uang sejumlah Rp118.888.800,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. MAHKOTA PRATAMA) (asli);
437. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 10 Desember 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran PAS Tahun 2018/2019 banyaknya uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Tengah kepada NENY R (CV. Mahkota Pratama) (asli);
438. 3 (tiga) lembar Biaya Pembuatan Soal (fotokopi);
439. 1 (satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN Dan MTsN Kota Bogor TA. 2018 (asli);
440. 1 (satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri TA. 2019 (asli);
441. 1 (satu) Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/TERBUKA DAN MTsN Kota Bogor TA. 2017 (asli);
442. 1 (satu) lembar Alur Pencarian APBD (asli);
443. 2 (dua) lembar Peraturan Wali Kota Bogor No. 91 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan. (asli);
444. 2 (dua) Keputusan Wali Kota Bogor No. 800.45-9.1 Tahun 2018 Tentang Penunjukan Saudara Jajang Koswara, S.PD Jabatan Kasubag Perencanaan Dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor tanggal 01 Februari 2018 (asli);

Hal. 44 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Wali Kota Bogor No.821-155 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Administrator Setara Kepala Bidang, Sekretaris Camat dan Kepala Bidang RSUD Dilingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 28 Desember 2016 (fotokopi);
446. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421/244- Bidang SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Triwulan III TA. 2019 tanggal 9 Juli 2019 (fotokopi);
447. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421/369- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2017 Oktober 2017 (fotokopi);
448. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.2/32- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2017 tanggal 18 Januari 2017 (fotokopi);
449. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.2/162- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah

Hal. 45 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2017 19 April 2017 (fotokopi);
450. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 421.2/258- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan IV TA. 2018 3 Oktober 2018 (fotokopi);
451. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 422/09- Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan I TA. 2019 tanggal 7 Januari 2019 (fotokopi);
452. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 422.5/82- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan II TA. 2018 tanggal 3 April 2018 (fotokopi);
453. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 426/267- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2017 tanggal 10 Juli 2017 (fotokopi);
454. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 460/101/Bid.SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak

Hal. 46 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Triwulan II TA. 2019 tanggal 4 April 2019 (fotokopi);

455. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/14-Disdik Tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor TA.2019 tanggal 11 Januari 2019 (fotokopi);

456. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 900/17- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan I TA. 2018 Januari 2018 (fotokopi);

457. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 900/142- SD Tentang Penetapan Sekolah Penerima Biaya Oprasional Sekolah Kota Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Triwulan III TA. 2018 tanggal 3 Juli 2018 (fotokopi);

458. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A20s berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081219798090;

459. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A50s berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081384948786;

460. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Type Vivo 1904 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 085217773922;

461. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme type RMX 1911 berwarna biru dengan kartu simcard nomor : 081315160211;

462. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo Type CPH 1933 berwarna hitam dengan kartu simcard nomor : 081388993364;

463. 1 (satu) buah *handphone* merek Realme Type RMX 1911 berwarna ungu dengan kartu simcard nomor : 085925156234;

Hal. 47 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.45-68.2 Tahun 2017, tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pengangkatan Dan Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
465. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2017 (asli);
466. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2018 (asli);
467. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Tajur 2 T.A 2019 (asli);
468. 1 (satu) rangkap kwitansi fotokopi PAS Kelas 1 sampai 6, tanggal 13-12-2019 (asli);
469. Uang Sejumlah Rp985.485.200,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
470. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Nomor: 422/565/Skep/IX/2018 tentang Pembentukan Komite Sekolah Dasar Negeri Kebon Pedes 5 Periode Tahun 2018-2021 tanggal 10 September 2018 (fotokopi);
471. 1 (satu) bundel Faktur Kegiatan fotokopi Penggandaan Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) Genap Tahun Pelajar 2019-2020 SDN Curug 3 Kota Bogor (asli);
472. 1 (satu) bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2017 (asli);
473. 1 (satu) bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2018 (asli);
474. 1 (satu) bundel Faktur Dan Kwitansi SDN Curug 3 Tahun 2019 (asli);
475. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2017 SDN Curug 3 (asli);

Hal. 48 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Curug 3 (asli);
477. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun 2019 SDN Curug 3 (asli);
478. 1 (satu) bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun 2017 (asli);
479. 1 (satu) bundel Laporan Operasional Sekolah Dari Pengembalian Ulangan Dan Ujian Tahun Pelajaran 2018 (asli);
480. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (Dsk. 028);
481. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN JULI 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.029);
482. 1 (satu) bundel Realisasi Dana BOS APBN Januari 2017 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.030);
483. 1 (satu) bundel Realisasi Dana BOS APBN Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.031);
484. 1 (satu) bundel Realisasi Penggunaan Dana BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.032);
485. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.033);
486. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.034);
487. 1 (satu) bundel Realisasi Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.035);

Hal. 49 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.036);
489. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.037);
490. 1 (satu) bundel Realisasi Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.038);
491. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.039);
492. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.040);
493. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2019 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.041);
494. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.042);
495. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.043);
496. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.044);
497. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.045);
498. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2017 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.046);
499. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.047);

Hal. 50 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKA-S) 2018 SDN Harjasari 1 Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.048);
501. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN Triwulan 3 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.049);
502. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.050);
503. 1 (satu) bundel Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK. 051);
504. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dana Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK. 052);
505. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.053);
506. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.054);
507. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.055);
508. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.056);
509. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.057);
510. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.058);

Hal. 51 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 3 SDN KERTAMAYA Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.059)
512. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.060)
513. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.061);
514. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.062);
515. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.063);
516. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS APBN 2018 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.064);
517. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2019 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.065);
518. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2019 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.066);
519. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2019 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.067);
520. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2019 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.068);
521. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.069);

Hal. 52 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Bantuan Operasional Sekolah 2017 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.070);
523. 1 (satu) bundel Kegiatan Dan Anggran Sekolah (RKAS) Format 2A 2018 SDN Papandayan Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.071);
524. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.072);
525. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.073);
526. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan DANA BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Polisi 1 Kecamatan Bogor Tengah (fotokopi); (DSK.074);
527. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan 2019 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.075);
528. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2017 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.076);
529. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2018 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.077);
530. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.078);
531. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.079);
532. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.080);

Hal. 53 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.081);
534. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.082);
535. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2018 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.083);
536. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2018 Triwulan 4 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.084);
537. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.085);
538. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 3 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.086);
539. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 2 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.087);
540. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2017 Triwulan 1 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.088);
541. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban BOS APBN 2019 Triwulan 4 SDN Bangka 3 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.089);
542. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Kartamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.090);
543. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN TAJUR 2 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.091);

Hal. 54 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

544. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2018 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.092);
545. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2017 SDN Tajur 2 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.093);
546. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN 2018 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.094);
547. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN 2019 Triwulan 1 SDN TAJUR Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.095);
548. 1 (satu) bundel BOS APBN 2017 Triwulan 1 Kecamatan Bogor Timur (fotokopi); (DSK.096);
549. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS Apbn 2018 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.097);
550. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.098);
551. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN 2019 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.099);
552. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN 2017 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.0100);
553. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2018 Triwulan 1 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.0101)
554. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2018 Triwulan 2 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.0102);

Hal. 55 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



555. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/SIRKAS 2018 Triwulan 3 SDN Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan (fotokopi); (DSK.0103);
556. 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kecamatan Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SDN dan Swasta (asli);
557. 1 (satu) bundel Rekap Penerimaan Operasional K3S Kecamatan Bogor Barat Tahun 2017 dan 2018 untuk SD Negeri (asli);
558. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 Tentang Susunan Pengurus K3S SD Kecamatan Bogor Barat;
559. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
560. 1 (satu) Buah buku Keuangan K3S Bogor Barat Tahun 2018 (asli);
561. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 1 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp40.111.200,00 dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. Valentine Offset (asli);
562. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PAS Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 24.282 siswa sejumlah Rp291.384.000,00 dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. Valentine Offset (asli);
563. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 06 Desember 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp744.000,00 dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. Valentine Offset (asli);

*Hal. 56 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

564. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal TO 2 dan pemindaian LJK sebanyak 4.029 siswa sejumlah Rp46.891.500,00 dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. Valentine Offset (asli);
565. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Maret 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester genap sebanyak 23.418 siswa berikut meterai sejumlah Rp225.549.000,00 dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. Valentine Offset (asli);
566. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran Cetak Naskah Soal PTS semester ganjil sebanyak 22.538 siswa sejumlah Rp216.364.800,00 dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. Valentine Offset (asli);
567. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran pengganti Bea Meterai sejumlah Rp702.000,00 dari Bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat kepada CV. Valentine Offset (asli);
568. 1 (satu) bundle kwitansi pembayaran dari bendahara K3S Kecamatan Bogor Barat Kepada seluruh perusahaan penyedia (RISNANTO) atas pembuatan soal ujian UTS, UAS, TO, UKK, US Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 (fotokopi);
569. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.2.45-142 Tahun 201 2 Perpanjangan Masa Tugas Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (fotokopi legalisir);
570. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (asli);

Hal. 57 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

571. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (asli);
572. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (asli);
573. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (asli);
574. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (asli);
575. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Cikaret 1 Bogor Selatan Kota Bogor. (asli);
576. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2017. (asli);
577. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2018. (asli);
578. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum, Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Tahun Anggaran 2019. (asli);
579. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (fotokopi);
580. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2016/2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan);
581. 25 (dua puluh lima lembar) Daftar Penerimaan Keuangan TO 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan);

Hal. 58 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

582. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2017 (setiap lembaran ditandatangani Ketua dan Bendahara K3S Kecamatan Bogor Selatan);
583. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum K3S Kecamatan Bogor Selatan Tahun 2018;
584. 1 (satu) Buah Buku Kas Pengeluaran Kecamatan Bogor Selatan Berwarna Biru;
585. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 51/MP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO I Th.Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp10.000,00 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (asli);
586. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 53/MP/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO II Th.Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3.048 x Rp10.000,00 dan Bea Materai dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (asli);
587. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Bea Materai Untuk TO3, UKK6 dan US dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (asli);
588. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 27/MP/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal US Th. Pelajaran 2016/2017 sebanyak 3072 siswa x Rp16.500,00 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (asli);
589. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 28/MP/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 Untuk Pembayaran Penggandaan Naskah UKK Kls 1 S/d 5 Th. 2016/2017 sebanyak 15.501 x Rp8.500,00 dan Materai Rp537.000,00 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Mahkota Pratama) (asli);
590. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 14 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Th.

Hal. 59 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/2018 (Pembayaran Pertama) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Mahkota Pratama) (asli);

591. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 26 September 2017 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UTS Ganjil Th. 2017/2018 (tambahan dana) dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (asli);
592. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota tanggal 11 Pebruari 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan TO1 Tahun 2017 (53 Orang x 1 hari x Rp25.000,00) (asli);
593. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota tanggal 16 Maret 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat TO 2 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp25.000,00) (asli);
594. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota tanggal 22 April 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi untuk Kegiatan Rapat Persiapan TO3 Tahun 2017 (53 Orang x 1 Hari x Rp30.000,00) (asli);
595. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 29 April 2017 Untuk Pembayaran Kegiatan Olahraga Tradisional (asli);
596. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota tanggal 01 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Sosialisasi Kegiatan US Tahun 2017 (asli);
597. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota tanggal 04 Mei 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Makan Kegiatan Rapat Persiapan US TP 2017 (55 Orang x 1 Hari x Rp30.000,00) (asli);
598. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota tanggal 06 Mei 2017 Untuk Pembayaran Snack Box (423 orang x 15.000) (asli);
599. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor Berikut Nota tanggal 01 Juni 2017 Untuk Pembayaran Konsumsi Kegiatan Rapat Persiapan UKK Tahun 2017 (asli);

Hal. 60 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 30 Agustus 2017 Untuk Pembayaran Sumbangan Pembelian 2 Kambing Kurban (asli);
601. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 04 Oktober 2017 Untuk Pembayaran Penggantian Materai dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P (CV. Valentine Offset) (asli);
602. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 14 November 2017 Untuk Pembayaran Kaos Guruhawan 6 pcs (asli);
603. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Tunai ke Rekening 58581006275/DRS. J.R RISNANTO Bank OCBC NISP (asli);
604. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 25/VO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah TO1 dan Pemindaian, Cetak Offset Naskah UTS/PAS, Materi TO1 dan UTS/PAS Th. 2017/2018 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada J.R. RISNANTO (CV. Valentine Offset) (asli);
605. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 74/MA/IV/2018 tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal UKK Kelas VI dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (asli);
606. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 76/MA/IV/2018 tanggal 28 April 2018 Untuk Pembayaran Cetak Offset Naskah Soal TO3 dan Pemindaian LJK sebanyak 3.174 siswa x Rp13.500,00 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (asli);
607. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 29 September 2018 untuk titipan pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th. pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (asli);
608. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS semester ganjil Th.pelajaran 2018/2019 sebanyak 19.231 x Rp9.600,00

Hal. 61 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (asli);

609. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanpa Nomor tanggal 30 November 2018 untuk ke-1 cetak offset naskah soal UAS Th. Pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (asli);
610. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor: 68/P/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 untuk cetak offset naskah soal PAS Th. 2018/2019 sebanyak 18.772 x Rp 12.000,00 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY. P. (CV. Puspita) (asli);
611. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa Nomor tanggal 14 Desember 2018 untuk pembayaran pembuatan naskah PAS dan UAS Th.pelajaran 2018/2019 dari Bendahara K3S SD Kota Bogor Kepada J.R. RISNANTO (CV. Valentine Offset) (asli);
612. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 08 Februari 2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan TO 1 Tp. 2018/2019 (55 x 25.000,00) (asli);
613. 1 (satu) lembar nota tanggal 12 Februari 2018 untuk pembayaran 2 box snack & makanan (asli);
614. 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 28 Februari 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin KepalaSekolah (55 orang x 45.000,00) (asli);
615. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 15 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan makan rapat persiapan TO2 TP.2018/2019 (55 orang x 25.000,00) (asli);
616. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 17 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan rapat persiapan UTS genap TP.2018/2019 (55 orang x 30.000,00) (asli);
617. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 Maret 2018 untuk pembayaran 10 nasi box (asli);

Hal. 62 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

618. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 31 Maret 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000,00) (asli);
619. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 April 2018 untuk pembayaran konsumsi pengajian rutin Kepala Sekolah (55 orang x 45.000,00) (asli);
620. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 16 April 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan sosialisasi kegiatan US TP. 2018-2019 (60 orang x 30.000,00) (asli);
621. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 19 April 2018 untuk pembayaran konsumsi snack kegiatan pembekalan untuk pengawas ruang (423 orang x 15.000,00) (asli);
622. 1 (satu) lembar nota tanggal 22 April 2018 untuk pembayaran 7 nasi box (asli);
623. 1 (satu) lembar nota tanggal 23 April 2018 untuk pembayaran 21 nasi box (asli);
624. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 April 2018 untuk pembayaran penggantian materai untuk kwitansi TO1, TO2, penggantian bea materai TO3 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung) (asli);
625. 1 (satu) lembar nota tanggal 2 Mei 2018 (asli);
626. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Agustus 2018 (asli);
627. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 20 September 2018 untuk pembayaran konsumsi makan kegiatan rapat persiapan UTS ganjil TP. 2018-2019 (55 orang x 30.000,00) (asli);
628. 1 (satu) lembar nota tanggal 24 September 2018 (asli);
629. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 September 2018 untuk pembayaran kegiatan IGORA Bogor Selatan (asli);
630. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran titipan pembayaran pajak 1,5% (PPH)

Hal. 63 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (asli);

631. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 30 September 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (asli);
632. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor berikut nota tanggal 30 November 2018 untuk pembayaran konsumsi kegiatan pengajian bulanan Kepala Sekolah (55 orang x 45.000) (asli);
633. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk titipan pembayaran pajak PPn 10% untuk sekolah di lingkungan Kecamatan Bogor Selatan dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (asli);
634. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 Desember 2018 untuk pembayaran penggantian bea materai dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Puspita) (asli);
635. 1 (satu) buah buku catatan kecil K3S Kota warna coklat (asli);
636. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (asli);
637. 4 (empat) lembar buku kas umum K3S Kota Bogor Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ketua K3S Kota Bogor dan Bendahara K3S Kota Bogor (asli);
638. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS bulan Maret 2017 (asli);
639. 4 (lembar) rekapitulasi penggunaan dana kegiatan UTS/PTS genap bulan Maret 2018 (asli);
640. 7 (tujuh) lembar daftar penyusun naskah soal UTSPS Per Kecamatan (asli);
641. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Februari 2017 untuk pembayaran koordinasi kegiatan pemeriksaan BOS dari K3SK SD kepada KARSONO (asli);

*Hal. 64 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor untuk pembayaran sumbangan bencana alam di SD Batutulis 4 dari K3S Kota Bogor kepada Rahmat dan 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 07 desember 2018 untuk bantuan bencana alam (longsor) di SDN. Bondongan dari K3S Kota Bogor kepada Rohani, S.Pd (asli);
643. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor bulan Desember 2018 untuk pembayaran sumbangan bencana puting beliung dari K3S Kota Bogor kepada Sukmana, S.Pd (asli);
644. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 18 Desember 2018 untuk pembayaran aplikasi raport kurikulum 2013 sebanyak 283 Sekolah Dasar dari K3S Kota Bogor kepada VENI ROSARI (asli);
645. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 872/RB-IKL/Nov-18 tanggal 30 November 2018 untuk pembayaran iklan kolom uk. 7klm x 50mmk Per 25 November 2018 “Ucapan HUT PGRI” dari Dinas Pendidikan Kota Bogor kepada Bogor Ekspres Media (asli);
646. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 April 2019 untuk bantuan kontingen Kota Bogor ke Pentas PAI SD Jawa Barat th. 2019 dari Ketua MKKS SD Kota Bogor kepada Dr. H. Zaenal Abidin untuk (asli);
647. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 37/VO/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS ganjil th.pelajaran 2017/2018 sebanyak 19.556 x Rp8.000,00 dari Bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Selatan Kepada NENY.P (CV. Valentine Offset) (asli);
648. 1 (satu) buku catatan berwarna hijau;
649. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/347/GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Tengah Periode Tahun 2017-2020. (fotokopi);

Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/Terbuka Dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017. (fotokopi);
651. 1 (satu) buku Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kota Jenjang TKN, SDN, MIN, SMP Negeri Tahun Anggaran 2019. (fotokopi);
652. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Panaragan 1 Kota Bogor. (fotokopi);
653. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor: 07545/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja. (fotokopi);
654. 1 (satu) Eksemplar Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS-SD) Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
655. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. Valentine Offset Tahun 2017. (fotokopi);
656. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. Mahkota Pratama Tahun 2018. (fotokopi);
657. 1 (satu) bundel Kwitansi, Faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama Antara SDN Panaragan 1 dan CV. Puspita Tahun 2019. (fotokopi);
- dari : Mohamad Wahyu, S.Pd
658. 1 (satu) bundel kwitansi dan faktur dari SDN Kertamaya kepada CV. Mahkota Pratama dan CV. Valentine Offset tahun Anggaran 2017. (asli);

Hal. 66 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Maret 2017. (fotokopi);
660. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (asli);
661. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Perbaikan Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (asli);
662. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum bulan Januari – Desember tahun 2018 SDN Kertamaya. (fotokopi);
663. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2018. (asli);
664. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya. (Manual) (asli);
665. 1 (satu) bundel Buku Kas umum bulan Januari – Desember tahun 2019 SDN Kertamaya. (asli);
666. 1 (satu) bundel kwitansi, faktur, dan Surat Pernyataan Kerjasama SDN Kertamaya tahun 2019. (asli);
667. 1 (satu) eksemplar Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Tahun 2020 untuk SD SMP SMA dan SMK. (fotokopi);
668. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (asli);
669. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2019 SDN Kertamaya. (SIRKAS) (asli);
670. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar (Sd) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (Sd) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan

Hal. 67 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor  
(MUSTOPA, S.Pd) (fotokopi);

671. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2017 SDN Kertamaya. (Manual) (asli);
672. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBD Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (asli);
673. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018 SDN Kertamaya (SIRKAS). (asli);
674. 2 (Dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.45-68.2 Tahun 2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Dan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sebagai Kepala Sekolah SDN Polisi 1 Kota Bogor (fotokopi);
675. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0071251365101 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotokopi);
676. 1 (satu) lembar fotokopi nomor rekening 0133100632236 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Tahun 2018. (fotokopi);
677. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095249140001 atas nama BOS APBD SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019. (fotokopi);
678. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi rekening 0095245095001 atas nama BOS APBN SDN Polisi 1 Bank BJB Cabang Bogor Periode 01-05-2019 s.d 17-05-2019 (fotokopi);
679. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor: 421.2/561-SDN.Polsat/2020 tanggal 04 Februari 2020 Perihal Pembayaran

Hal. 68 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan PTS Ganjil tahun pelajaran 2018/2019 masih dilakukan secara tunai. (asli);

680. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 Tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (fotokopi legalisir);
681. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/347/GTK-Disdik Tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Selatan Periode Tahun 2017-2020. (fotokopi legalisir);
682. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 07574/B/PR/2017 tanggal 6 Maret 2017 Perihal: Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pemberdayaan Kelompok Kerja (fotokopi legalisir);
683. 1 (satu) lembar Surat Nomor: 005/4314-Bid.SD tanggal 13 Agustus 2019 Perihal : Pemberitahuan (fotokopi);
684. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Nomor: 421.2/157/Ckr1/IX/II/2017 tentang Pembentukan Komite Sekolah Dasar Negeri Cikaret 1 Kota Bogor Periode 2017-2020 tanggal 28 September 2017. (asli);
685. 1 (satu) bundel Surat Perintah Nomor: 800/ 3748-Bid.SMP Untuk Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dan Tata Kelola Penggunaan Dana BOS APBN Triwulan I Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 24 Mei 2018 s.d 26 Mei 2018 s.d 31 Mei 2018 dan 4 Juni 2018 di Sekolah-sekolah terlampir tanggal 22 Mei 2018 (asli);
686. 1 (satu) bundel Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-23 Tahun 2018 tentang Penetapan Rekening Penyaluran dan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Bogor tanggal 2 Januari 2018 (fotokopi);

Hal. 69 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tentang Alih Tugas Guru yang diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi);
688. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Bank Jabar Banten KCP Sudirman No Rekening 0095248861001 Tahun 2019 (fotokopi);
689. 1 (satu) bundel RKAS BOS APBN Tahun 2017 SDN Babakan (asli);
690. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun 2017 SDN Babakan Kecamatan Bogor Tengah (asli);
691. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2018 Babakan Kecamatan Bogor Tengah (asli);
692. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 Babakan Kecamatan Bogor Tengah (asli);
693. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2019 Babakan Kecamatan Bogor Tengah (asli);
694. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Sekolah Dasar Negeri Babakan Tahun Anggaran 2019 (asli);
695. 1 (satu) bundel Kegiatan TUC 1, TUC 2, UTS Genap, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
696. 1 (satu) bundel Kegiatan TUC 3, UKK, US, USBN, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
697. 1 (satu) bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);
698. 1 (satu) bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 4 SDN Babakan Tahun 2017 (asli);

Hal. 70 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

699. 1 (satu) bundel Kegiatan TUC 1, UTS Genap, TUC 2, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
700. 1 (satu) bundel Kegiatan TUC 3, UKK, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
701. 1 (satu) bundel Kegiatan UTS Ganjil Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 3 SDN Babakan Tahun 2018 (asli);
702. 1 (satu) bundel Kegiatan UKK Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 1 SDN Babakan Tahun 2019 (asli);
703. 1 (satu) bundel Kegiatan US Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN Triwulan 2 SDN Babakan Tahun 2019 (asli);
704. 1 (satu) bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD (fotokopi);
705. 1 (satu) bundel draf Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Musyawarah Kepala Sekolah Dasar (MKKSD) (fotokopi);
706. 1 (satu) bundel Proposal Rapat Kerja (RAKER) K3S-SD Kota Bogor (fotokopi);
707. 2 (dua) lembar Program Kerja K3S Tahun Pelajaran 2016-2017 (fotokopi);
708. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 980 45-182 Tahun 2016 tanggal 30 September 2016 (fotokopi);
709. 1 (satu) buah Buku Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah (asli);
710. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.2.45-173 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor tanggal 17 Desember 2015 (fotokopi);
711. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SD Negeri Bangka 3 Nomor: 420/01-SDN Bk3/I/ 2018 tanggal 22 Juli 2018;

Hal. 71 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712. 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SD Negeri Papandayan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (asli);
713. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/063-SDN-PAP/II/2016 Tentang Penetapan Susunan Komite Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 tanggal 4 Januari 2016-2019 (asli);
714. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Papandayan Nomor: 421.2/132-SDN-PAP/II/2019 Tentang Penetapan Susunan Komite Pergantian Antar Waktu Sekolah Dasar Negeri Papandayan Kota Bogor Masa Bakti 2016-2019 tanggal 7 Agustus 2019 (fotokopi);
715. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (asli);
716. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun 2017 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (asli);
717. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan (RKASP) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (asli);
718. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SD Negeri Otista Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor (asli);
719. 1 (satu) bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2017 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
720. 1 (satu) bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2018 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
721. 1 (satu) bundel SPJ BOS APBN Kuitansi 2019 SDN Otista Bogor Jl. Otto Iskandar Dinata No 78 (asli);
722. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 49/MP/III/ 2017 tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA.

Hal. 72 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016/2017 sebanyak 9.610 X Rp8.000,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
723. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 48/MP/III/ 2017 tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO I TA. 2016/2017 sebanyak 1.930 X Rp10.000,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
724. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/III/ 2017 tanggal 14 Maret 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO II TA. 2016/2017 sebanyak 1.930 X Rp10.000,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
725. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 40/VO/XII/ 2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS Ganjil TA. 2017/2018 sebanyak 9.513 X Rp8.000,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Valentine Offset);
726. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 50/MP/IX/ 2017 tanggal 14 September 2017 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS TA. 2017/2018 sebanyak 9.539 X Rp8.000,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mahkota Pratama);
727. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 68/MA/III/ 2018 tanggal 8 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UTS genap TA. 2017/2018 sebanyak 9.470 X Rp9.600,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada HADIAN AGUNG P, SE (CV. Mulia Agung);
728. Kwitansi Nomor 35/MA/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 6 genap TA. 2017/2018 sebanyak 1.536 X Rp9.600,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);

Hal. 73 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

729. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 38/MA/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UKK 1-5 TA. 2017/2018 sebanyak 7.930 X Rp9.600,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
730. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 32/MA/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 1 TA. 2017/2018 sebanyak 1.933 X Rp9.800,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada Hadian Agung P, SE (CV. Mulia Agung);
731. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 73/MA/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 2 sebanyak 1.933 X Rp11.500,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada Hadian Agung P, SE (CV. Mulia Agung);
732. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 36/MA/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal TO 3 TA. 2017/2018 sebanyak 1.933 X Rp13.500,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
733. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 37/MA/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal US sebanyak 1.933 X Rp19.800,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Mulia Agung);
734. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 September 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal PTS TA. 2018/2019 sebanyak 9.381 X Rp9.600,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita);
735. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 5 Desember 2018 untuk pembayaran cetak offset naskah soal UAS TA. 2018/2019 sebanyak 9.352 X Rp12.000,00 dari bendahara K3S SD Kecamatan Bogor Timur kepada NENY P (CV. Puspita);
736. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp25.407.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran penyeteroran UKK Tahun 2017 (asli);

Hal. 74 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



737. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp4.632.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran Kontribusi K3S Kota (TO1) Tahun 2017 (asli);
738. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp11.900.700,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembayaran penyeteran US Tahun 2017 (asli);
739. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp31.994.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Ganjil Tahun 2017 (asli);
740. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp31.994.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran PAS Tahun 2017 (asli);
741. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp31.807.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran UTS Genap Tahun 2018 (asli);
742. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp33.534.200,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) untuk pembayaran Penyeteran UKK Tahun 2018 (asli);
743. 2 (dua) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp6.718.400,00 (enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran Penyeteran US Tahun 2018 dan sebesar Rp5.652.800,00 (lima juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran kekurangan penyeteran Tahun 2018 (asli);
744. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara K3S Bogor Timur sebesar Rp20.581.000,00 (dua puluh juta lima ratus

Hal. 75 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran Penyetoran UTS Ganjil Tahun 2018 (asli);

745. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Puspita Nomor: 04 tanggal 09 Juli 2018;
746. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian CV. Valentina Offset Nomor: 04 tanggal 10 Oktober 2011;
747. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Pratama Nomor: 02 tanggal 04 Desember 2013;
748. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mahkota Putra Pratama : Nomor: 08 tanggal 15 Maret 2019;
749. 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mulia Agung Nomor: 01 tanggal 04 Desember 2013;
750. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (fotokopi);
751. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Mahkota Prima selama tahun 2018 (fotokopi);
752. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Selaawi kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (fotokopi);
753. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BANTARJATI 1 (asli);
754. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BANTARJATI 5 (asli);
755. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BANTARJATI 6 (asli);
756. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BANTARJATI 7 (asli);
757. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BANTARJATI 8 (asli);
758. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BANTARJATI 9 (asli);
759. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAWUNG LUWUK (asli);

Hal. 76 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

760. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BOGOR BARU (asli);
761. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CEGER 1 (asli);
762. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CEGER 2 (asli);
763. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KEDUNG HALANG 1 (asli);
764. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KEDUNG HALANG 2 (asli);
765. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KEDUNG HALANG 3 (asli);
766. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KEDUNG HALANG 5 (asli);
767. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 3 (asli);
768. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 4 (asli);
769. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 5 (asli);
770. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIBULUH 6 (asli);
771. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN BHAYANGKARI (asli);
772. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 1 (asli);
773. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 2 (asli);
774. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 3 (asli);
775. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 4 (asli);

Hal. 77 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIMAHPAR 5 (asli);
777. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAMPUNG SAWAH (asli);
778. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN NEGLASARI (asli);
779. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN KAUMSARI (asli);
780. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 1 (asli);
781. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 2 (asli);
782. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CILUAR 3 (asli);
783. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN TUNGGILIS (asli);
784. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN CIPARIGI (asli);
785. 1 (satu) bundel Kwitansi Kegiatan Ulangan/Penilaian tahun 2017-2019 dari SDN SINDANGSARI (asli);
786. 4 (lembar) kabar berita panen Rupiah di Soal Ulangan (fotokopi);
787. 1 (satu) lembar Uraian Tugas Jabatan Inspektur Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah ditetapkan di Bogor pada tanggal 12 Desember 2019 (fotokopi);
788. 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup Drs. Pupung Wahyu Purnama, M.Si (fotokopi);
789. 2 (dua) lembar Surat Inspektorat Nomor: 700/ 479 – Inspektorat tanggal 25 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Khusus (fotokopi);
790. 1 (satu) eksemplar Surat Inspektorat Nomor: 700/684 – Inspektorat tanggal 15 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil

Hal. 78 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Khusus atas Indikasi adanya Penyunatan Dana BOS TA. 2019 untuk pengadaan soal UTS-UAS (fotokopi);

791. 5 (lima) lembar Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.45 – 445 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Paratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (fotokopi);
792. 4 (empat) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK SDN Cibuluh 01 (asli);
793. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (fotokopi);
794. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah Perubahan Tahun anggaran 2019, SDN Cibuluh 1 (asli);
795. 1 (satu) bundel Bukti Fisik Penggandaan Naskah Soal, Tahun anggaran 2017, SDN Cibuluh 1 (fotokopi);
796. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.45-195 tahun 2002 tentang Penunjukan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pengawas Pembina Sekolah TK/SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Bogor, Dra. Rina Rusniar (fotokopi legalisir);
797. 6 (enam) lembar, Data perincian jumlah halaman soal-soal ulangan SD Sekolah Bogor, TA. 2017 – 2018 (print out dan CD);
798. 7 (tujuh) lembar, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok Kerja Kepala Sekolah Sekolah Dasar (KKKS-SD), Kecamatan Bogor Utara,
799. 9 (sembilan) lembar Daftar Penyusunan Naskah Soal PTS/UTS UAS/PAS TP 2017/2018 (asli);
800. 3 (lembar) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang susunan pengurusan kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) sekolah dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Bogor Utara, Nomor: 800/437/GTK-Disdik, periode tahun 2017-2020 (asli);

Hal. 79 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

801. 3 (tiga) lembar Data Perincian Kegiatan Try Out, US, UAS, dan UKK, SDN Ciluar 2 (asli);
802. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah-RKAS-Perubahan (fotokopi);
803. 1 (satu) bundel Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2017, SDN. Cibuluh 1 (asli);
804. 2 (Dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor 821-65 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Dari dan Dalam Jabatan Administtasi Setara Kepala Bagian, Sekretariat Dinas, Sekretariat pada Sekretariat KPU, Wakil Direktur RSUD dan Kepala Bagian RSUD, Kepala Bidang serta Sekretariat Camat di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor (a.n. Dra. Hj. Arni Suhaerni, M.Pd.) (fotokopi);
805. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 421.45-111 tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (fotokopi);
806. 7 (tujuh) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 420.45-85 tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
807. 5 (lima) lembar Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 421.45-89 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
808. 3 (tiga) lembar Peraturan Wali Kota Bogor Nomor: 91 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan (fotokopi);
809. 1 (satu) bundel Dokumen Kegiatan Penilaian Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Bogor Utara Tahun 2017/2018 (asli);
810. 1 (satu) bundel Dokumen Kwitansi penilaian Kecamatan Bogor Utara tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);

Hal. 80 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

811. 1 (satu) lembar data pembayaran kegiatan ulang SD Negeri Kawung Luwuk Tahun 2017, 2018 dan 2019 (asli);
812. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor: 421.2/SI.SDNKWL/113/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (fotokopi);
813. 2 (dua) lembar Surat Standing Intruction SDN Kawung Luwuk Nomor: 421.2/SI.SDNKWL/068/III/2019 Maret 2019 perihal pembayaran transfer ke penyedia (fotokopi);
814. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 (fotokopi);
815. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
816. 1 (satu) eksemplar Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) Kota jenjang TKN, SDN, MIN, SMPN/ Terbuka dan MTsN Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
817. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.2.45-12 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar di Lingkungan Sekolah Pemerintahan Kota Bogor, a.n. Gunarto, S.Pd.I (fotokopi legalisir);
818. 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 838.4.45-234 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat, Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian pensiun pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia pensiun a.n. Gunarto, S.Pd.I (fotokopi legalisir);
819. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-174 Tahun 2015 tentang Ahli Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor a.n. Hj. Sudarmi, S.Pd. (fotokopi legalisir).

Hal. 81 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820. 2 (dua) lembar Keputusan Walikota Bogor Nomor: 820.45-129 tentang Alih Tugas Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor Dan Pengangkatan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (fotokopi legalisir);
821. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibuluh 1, Nomor: 421.6/190-S.Kep/VII/2020 tentang Pengurus Komite Sekolah Masa Bakti 2018-2021 SD Negeri Cibuluh (asli);
822. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terimadari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2017 (asli);
823. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2018 (asli);
824. 1 (satu) bundel kwitansi sudah terima dari SDN Cibuluh 1 kepada CV. Valentine Offset selama tahun 2019 (asli);
825. 1 (satu) lembar Jumlah Siswa SD Negeri Banjarjati 8 (asli);
826. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2017 (fotokopi);
827. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2018 (fotokopi);
828. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Kota (BOS) Kota Tahun Anggaran 2019, SD Negeri Bantarjati 8 (asli);
829. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Bantuan Operasional Sekolah (BOS APBN) Pusat SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
830. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan Bos Pusat (APBN) SD Negeri Bantarjati 8 Tahun Anggaran 2019 (fotokopi);
831. Uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021





832. 1 (satu) bundel laporan keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sareal tahun 2017 sampai dengan 2019 yang sudah berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
833. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan kegiatan penilaian K3S Kecamatan Tanah Sereal tahun 2017 yang belum berdasarkan SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
834. 1 (satu) bundel Data Bendahara K3S Kota Tahun 2017-2018 (asli);
835. 1 (satu) lembar laporan keuangan K3S Kecamatan Tanah Sareal tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang sudah mendapat SK penetapan struktur K3S dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (asli);
836. 1 (satu) bundel SK Kepala Dinas Kota Bogor Nomor: 800/347 GTK-Disdik tanggal 28 September 2017 tentang Susunan Pengurus Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta Kota Bogor Kecamatan Tanah Sareal;
837. 1 (satu) bundel Kegiatan MKKS Kecamatan Tanah Sareal tahun pelajaran 2018/2019 (catatan penerimaan dari Kepala Sekolah);
838. 1 (satu) bundel catatan pemasukan dan pengeluaran kegiatan K3S Kecamatan Tanah Sareal tahun pelajaran 2017/2018;
839. 1 (satu) bundel anggaran dasar dan anggaran rumah tangga K3S Kecamatan Tanah Sareal;
840. 1 (satu) bundel Program Kerja K3S Kecamatan Tanah Sareal;
841. 1 (satu) bundel SK Walikota Bogor Nomor 900.45-96 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas lampiran keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-261 tahun 2018 tentang penetapan standar biaya khusus di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019;
842. 1 (satu) bundel pengajuan standart biaya khusus komponen penggunaan dana BOS APBN pada satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD dan SMP se Kota Bogor (fotokopi);

*Hal. 83 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

843. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/03-Disdik tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan dan Staf PPTK Pada Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Anggaran 2017;
844. 1 (satu) bundel lembar Pengesahan, Profil Sekolah, RKAS 2017, Rekapitulasi BOS APBN 2017, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (asli);
845. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Format 2A Tahun 2018 SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (fotokopi);
846. 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Sirkas APBN Tahun 2019, SDN. Kebon Pedes 1, Tanah Sareal (fotokopi);
847. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sareal (fotokopi);
848. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (fotokopi);
849. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 1 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (fotokopi);
850. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2017, Tanah Sareal (fotokopi);
851. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2018, Tanah Sareal (fotokopi);
852. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN SDN. Kencana 3 Tahun Anggaran 2019, Tanah Sareal (fotokopi);

Hal. 84 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

853. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2017, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
854. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN bulan April, Mei, Juni 2017, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
855. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, bulan Juli, Agustus, September 2017, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
856. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN bulan Oktober, November, Desember 2017, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
857. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN Pusat bulan Januari, Februari, Maret 2018, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
858. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN/Pusat Periode April, Mei, Juni 2018, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
859. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Daana BOS APBN Periode bulan Juli, Agustus, September 2018, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
860. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Daana BOS APBN Periode bulan Oktober, November, Desember 2018, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
861. 1 (satu) bundel Laporan BOS APBN, Periode bulan Januari, Februari, Maret 2019, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
862. 1 (satu) bundel Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode bulan April, Mei, Juni 2019, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
863. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode bulan Juli, Agustus, September 2019, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);

Hal. 85 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS APBN Pusat, Periode bulan Oktober, November, Desember 2019, SDN. Kencana 3, Kecamatan Tanah Sareal (fotokopi);
865. 1 (satu) bundel Daftar Arsip Soal Tahun Anggaran 2017, SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (fotokopi);
866. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung tanggal 10 Februari 2017, SDN Kencana 3, Tanah Sareal, senilai Rp1.332.000,00 (fotokopi);
867. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset tanggal 1 Februari 2018, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (fotokopi);
868. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Perhitungan Pembayaran Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (fotokopi);
869. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita Tahun 2019, SDN Kencana 3, Tanah Sareal (fotokopi);
870. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2017 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (fotokopi);
871. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun 2018 SDN. Kencana 3, Tanah Sareal (fotokopi);
872. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (fotokopi);
873. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (fotokopi);
874. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2017 (fotokopi);
875. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2018 (fotokopi);
876. 1 (satu) bundel Laporan BKU, BKT, Buku Bank, Buku Pajak, K7a, dan SPTJM SDN. Kukupu 3, Tahun 2019 (fotokopi);
877. 1 (satu) bundel Kuitansi PT. Vanika Jaya, Polisi 1 (Rp6.460.800) dll. Total Rp18.355.400; dll. (fotokopi);
878. 1 Bendel Surat-surat terdiri dari:

Hal. 86 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petikan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 821.2.45-173 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atas nama Dra. Hj. INDAH ROSMANAH, M.Si. (asli);
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor: 800/346-GTK tanggal 28 September 2017 Tentang wilayah Kerja Pengawas Tingkat Sekolah Dasar Jenjang SD Kota Bogor Periode Tahun 2017-2019 a.n. Dra. Hj. INDAH ROSMANAH, M.Si. (fotokopi yang dilegalisir);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2017 (asli);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2018 (asli);
- Laporan Hasil Pengawasan bulan Januari s.d. Desember 2019 (asli);

879. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mahkota Pratama, Tahun 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (fotokopi);

880. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (fotokopi);

881. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun Anggaran 2017 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (fotokopi);

882. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) APBN Tahun 2018 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (fotokopi);

883. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019 SDN. Kukupu 3, Tanah Sareal (fotokopi);

884. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Mulia Agung, No. 012/MA/V/2017SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2017 (fotokopi);

Hal. 87 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

885. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Valentine Offset, No: 003/VO/IX/2018 SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2018 (fotokopi);
886. 1 (satu) bundel Kuitansi CV. Puspita, No. 003/P/III/2019, SDN. Kedung Jaya 2 Tanah Sareal, Tahun 2019 (fotokopi);
887. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kedung Jaya 2 (fotokopi);
888. 7 (tujuh) lembar Asistensi RKAS Sekolah Belanja Langsung, Tahun Anggaran 2019, SDN. Kedung Jaya 2 (fotokopi);
889. 1 (satu) bundel RKAS Perubahan Tahun 2017, SDN. Kedung Jaya 2 (fotokopi);
890. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 1 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2 (fotokopi);
891. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 2 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2 (fotokopi);
892. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 3 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2 (fotokopi);
893. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Triwulan 4 (tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019) SDN. Kedung Jaya 2 (fotokopi);
894. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
895. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
896. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);

Hal. 88 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

897. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
898. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
899. 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Perubahan BOS APBN Tahun Anggaran 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal (asli);
900. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2017 (Triwulan I) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
901. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2017 (Triwulan II) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
902. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2017 (Triwulan III) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
903. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2017 (Triwulan IV) T.A 2017, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
904. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2018 (Triwulan I) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
905. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2018

Hal. 89 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Triwulan II) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
906. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2018 (Triwulan III) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
907. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
908. 1 (satu) bundel Bukti-Bukti Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Desember 2018 (Triwulan IV) T.A 2018, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
909. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Januari-Maret 2019 (Triwulan I) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
910. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode April-Juni 2019 (Triwulan II) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
911. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Juli-September 2019 (Triwulan III) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor (asli);
912. 1 (satu) bundel Laporan Penggunaan Dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) APBN, Periode Oktober-Desember 2019 (Triwulan IV) T.A 2019, SDN. Kebon Pedes 5, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor;
913. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2017;

Hal. 90 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2018;

915. 1 (satu) bundel Kumpulan Soal-soal Ulangan Umum SD Sekota Bogor Tahun 2019;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. Gunarto, S. Pd.I., dkk;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 5 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II. SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III. DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II. SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III. DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MOHAMAD WAHYU, S.Pd., Terdakwa II. SUBADRI, S.Ag.,M.M. dan Terdakwa III. DEDE M. ILYAS, S.Pd.,M.M., karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:  
Barang bukti nomor 282, 283 dan 284, berupa:

Hal. 91 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



282. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz AT Warna Hitam Plat Nomor F 1408 DO;

283. 1 (satu) buah BPKB Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (asli);

284. 1 (satu) buah STNK Toyota Avanza Veloz AT Plat Nomor F 1408 DO (asli);

Diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. J. R. Risnanto;

Barang bukti nomor 292 dan nomor 293, berupa:

292. 1 (satu) buah laptop merk Sony VAIO model SVE14113EGW warna putih beserta charger;

293. 1 (satu) buah laptop merk ASUS Windows 10 product ID: 00327-35000-00000-AAOEM warna rose gold beserta charger;

Diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. J. R. Risnanto;

Barang bukti nomor 434, berupa:

434. Uang tunai senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar;

Diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. J. R. Risnanto;

Selainnya, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 281, nomor 285 sampai nomor 291, nomor 294 sampai nomor 433 dan nomor 435 sampai nomor 915, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. Gunarto, S. Pd.I., dkk, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada tanggal 19 Maret 2021;

8. Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 8/TIPIKOR/2021/PT BDG tanggal 23 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 92 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Penasihat Hukum Terdakwa II: SUBADRI, S.Ag., M.M. tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg tanggal 5 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada para Terdakwa masing-masing harus membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bdg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2021, Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bdg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2021;

Membaca Surat Permohonan Penghentian Pemeriksaan/Mengadili Perkara pada Tingkat Kasasi tanggal 16 September 2021 dari Penasihat Hukum Ahli Waris Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 yang memohon agar perkara *a quo* dapat dihentikan

Hal. 93 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutannya pada tingkat kasasi dengan alasan Terdakwa II telah meninggal dunia;

Membaca Surat Laporan Meninggal Dunia Seorang Narapidana a.n. Subadri, S.Ag, M.M. bin M. Yusuf tanggal 15 Juli 2021 dari Kepala Rutan Kelas I Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli yang bersangkutan telah meninggal dunia di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dikarenakan sakit dengan lampiran Surat Keterangan Meninggal dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Nomor 326/E/VII/2021;

Membaca Surat Laporan Kematian Terdakwa Tindak Pidana Korupsi a.n. Subadri, S.Ag, M.M. tanggal 26 Juli 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang melaporkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa telah meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada tanggal 2 Juli 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus ternyata Majelis Hakim telah menerima surat pemberitahuan/laporan kematian bahwa Terdakwa II dalam perkara *a quo* atas nama Subadri, S.Ag, M.M. bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana diuraikan dalam:

1. Surat Permohonan Penghentian Pemeriksaan/Mengadili Perkara pada Tingkat Kasasi tanggal 16 September 2021 dari Penasihat Hukum Ahli Waris Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 yang memohon agar perkara *a quo* dapat dihentikan

*Hal. 94 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*



penuntutannya pada tingkat kasasi dengan alasan Terdakwa II telah meninggal dunia;

2. Surat Laporan Meninggal Dunia Seorang Narapidana a.n. Subadri, S.Ag, M.M. bin M. Yusuf tanggal 15 Juli 2021 dari Kepala Rutan Kelas I Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli yang bersangkutan telah meninggal dunia di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dikarenakan sakit dengan lampiran Surat Keterangan Meninggal dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Nomor 326/E/VII/2021;
3. Surat Laporan Kematian Terdakwa Tindak Pidana Korupsi a.n. Subadri, S.Ag, M.M. tanggal 26 Juli 2021 dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang melaporkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa telah meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung;

Menimbang, berdasarkan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia, sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa II harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan para Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan Terdakwa I. Mohamad Wahyu, S.Pd. selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Tengah, Terdakwa II. Subadri, S.Ag., M.M. selaku Ketua Kelompok Kerja

Hal. 95 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Selatan dan Terdakwa III. Dede M. Ilyas, S.Pd., M., selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Bogor Timur dalam kegiatan penggandaan naskah soal ujian tertulis Sekolah Dasar Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 (sampai dengan bulan Juni 2019). Para Terdakwa mengetahui dan menyetujui terdapat *cash back* dari penyedia pekerjaan (Drs. J.R. Risnanto) berupa pemotongan dari anggaran yang termuat dalam Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RKAS) dan/atau kontrak perjanjian (MOU) dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Kota Bogor dan pemotongan dana (*cash back*) tersebut disetor rekanan melalui Bendahara Kelompok Kerja Kepala Sekolah dipergunakan untuk kegiatan operasional biaya operasional Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), biaya pengawas dan untuk kegiatan lomba PAI/02SN sehingga menyimpang dari tujuan dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Kesalahan para Terdakwa yang demikian merupakan kesalahan berjamaah tidak hanya dilakukan para Terdakwa saja, demikian pula hasil korupsi yang diperoleh para Terdakwa tidak dinikmati sendiri melainkan juga untuk keperluan kegiatan operasional organisasi. Dengan demikian, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*. Pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada para Terdakwa juga telah tepat dan proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal-hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Hal. 96 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 77 KUHP, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan gugur hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa II. **SUBADRI, S.Ag., M.M. (Alm.)** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

*Hal. 97 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ H. Ansori, S.H., M.H.

**Ketua Majelis,**

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 98 dari 98 hal. Putusan Nomor 5115 K/Pid.Sus/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)